

Analisis Potensi Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur

*Analysis of Economic Potential to Increase Competitiveness in Border Areas
East Nusa Tenggara*

Angelina Delviana Klau¹, Ulul Hidayah²

angelinaklau@gmail.com¹, hidayahulul@gmail.com²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor¹

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka²

Abstract

The land border area of NTT Province which includes Malacca Regency, Belu Regency, TTU Regency and Kupang Regency. Based on NTT BPS data for 2016-2019 shows economic growth that always increases from year to year. The purpose of this study is to determine the economic potential to increase competitiveness in the East Nusa Tenggara Border Area. The method used is the analysis of LQ, Shift Share and Klassen Typology. The results of the analysis show that the economic potential of the land border area of East Nusa Tenggara Province in general is in the government administration sector, defense and mandatory social security. However, each region still has different advantages such as Kupang Regency excels in the quarrying and mining sector, TTU Regency excels in the transportation and warehousing sector, Belu Regency excels in the wholesale trade sector and Malaka Regency excels in the manufacturing sector. Each sector must be able to be encouraged as a leading sector which will later have a multiplier impact on the regional economy.

Keyword : Economic Potential, Border area, Competitiveness

Abstrak

Kawasan Perbatasan Darat Provinsi NTT yang meliputi Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Kabupaten Kupang. Berdasarkan data BPS NTT tahun 2016-2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada keempat wilayah tersebut selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui potensi perekonomian pada masing-masing daerah yang dapat mendorong peningkatan daya saing di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan adalah analisis LQ, Shift Share serta Tipologi Klassen. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi ekonomi wilayah perbatasan darat Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum ada di sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun masing-masing wilayah tetap memiliki keunggulan yang berbeda-beda seperti Kabupaten Kupang unggul pada sektor penggalan dan pertambangan, Kabupaten TTU unggul pada sektor transportasi dan pergudangan, Kabupaten Belu unggul pada sektor perdagangan besar dan Kabupaten Malaka unggul pada sektor industri pengolahan. Masing-masing sektor unggulan harus mampu didorong sebagai *leading* sektor yang nantinya akan memberikan dampak pengganda bagi perekonomian wilayah.

Kata Kunci : Potensi Ekonomi, Kawasan Perbatasan, Daya saing

Pendahuluan

UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dimana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi, dan sosio-budaya dengan cakupan wilayah administratif yang disepakati dengan negara tetangga (Bappenas, 2005). Wilayah perbatasan memiliki peran sangat penting sebagai pintu gerbang kegiatan perdagangan dan ekonomi dengan negara tetangga.

Pengembangan kawasan perbatasan sebagai wilayah terdepan yang menggambarkan wajah negara Indonesia, mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah pusat maupun

daerah karena posisinya yang strategis. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menggolongkan wilayah perbatasan menjadi kawasan strategis nasional yaitu sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

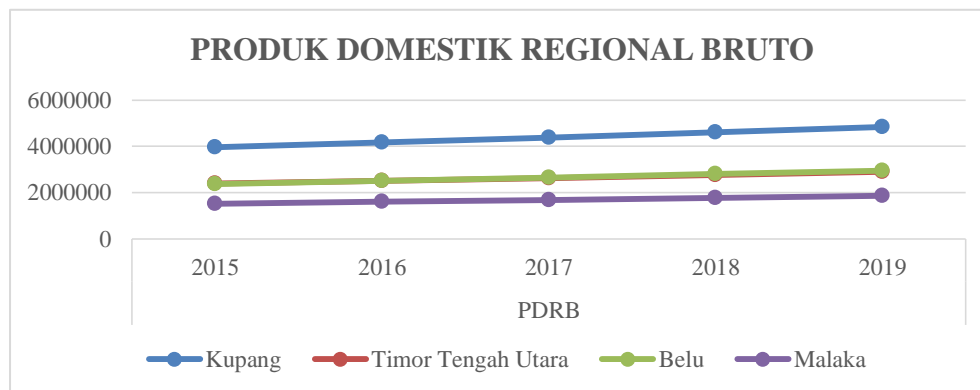
Pembangunan kawasan perbatasan menjadi salah satu isu terpenting dalam 9 agenda pembangunan (Nawacita). Pada cita ke tiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” diartikan sebagai membangun kawasan perbatasan negara menjadi kawasan yang maju dan berdaya saing. Kawasan perbatasan membutuhkan pengelolaan wilayah yang tepat seperti koordinasi antar pengambil kebijakan pada berbagai tingkat baik pusat, provinsi dan kabupaten sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan dapat menjadi langkah strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian Kennedy *et al.* (2018) mengemukakan bahwa terdapat berbagai permasalahan startegis di wilayah perbatasan yaitu: (1) masalah pertahanan keamanan dan penegakan hukum, (2) kurangnya infrastruktur yang memadai di kawasan perbatasan, (3) rendahnya kualitas sumberdaya manusia sehingga potensi sumberdaya alam tidak dapat dikelola dengan baik. Sedangkan menurut Kemitraan Partnertship (2011) permasalahan di kawasan perbatasan yaitu daerah perbatasan banyak yang mengalami keterbelakangan ekonomi karena tiadanya program dan proyek pemerintah maupun swasta. Sebagian dari masyarakat perbatasan mendapatkan fasilitas administrasi dan pelayanan publik, akses komunikasi dan informasi dari negara tetangga, hal ini disebabkan akses mereka yang rendah terhadap kantor-kantor pemerintahan Indonesia.

Selama ini pembangunan kawasan perbatasan selalu mengedepankan pendekatan keamanan dalam pengelolaannya, hal ini membuat aspek pembangunan sosial ekonomi menjadi terabaikan (Maliatja *et al.* 2019). Sehingga diperlukan suatu strategi pengembangan kawasan perbatasan melalui peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alternatif strategi untuk menggerakkan dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Pusat pertumbuhan ekonomi manakala diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi karena secara tidak langsung kemajuan daerah akan membuat masyarakat mencari kehidupan yang lebih layak di daerahnya (Sugianto dan Sukei, 2010). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya (Kuznets dalam Jhingan, 2003). Besarnya nilai tambah yang terdapat pada suatu daerah menunjukkan adanya pertumbuhan. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah termasuk kawasan perbatasan adalah dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagai suatu nilai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mengalami perubahan, perubahan struktural tersebut dapat dilihat dalam peranan sektor-sektor maupun wilayah yang berperan (Kusumastuti, 2014).

Indonesia memiliki wilayah perbatasan antar negara yang terdiri dari perbatasan darat dan laut dengan beberapa Negara. Salah satu batas negara Indonesia terdapat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Negara Australia. Kabupaten yang berbatasan laut adalah Kabupaten Alor, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat. Kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan Negara Timor Leste adalah Kabupaten

Belu, Kabupaten Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Kupang dengan panjang batas berturut-turut 149.1 km, 104.5 km, dan 15.2 km (RTRW Kawasan Perbatasan NTT, 2014).



Sumber: BPS Indonesia, diolah

Gambar 1 Perkembangan PDRB Kawasan Perbatasan Darat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kawasan perbatasan darat Provinsi NTT yang meliputi Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Kabupaten Kupang berdasarkan data BPS NTT tahun 2016-2017 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (Gambar 1). Pada tahun 2015 di Kabupaten Kupang PDRB nya sebesar Rp3.968.939 juta pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp190.727 juta menjadi Rp4.159.665 juta. Di tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp212.214 juta menjadi Rp4.371.880 juta, tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp223.935 juta menjadi Rp4.595.816 juta pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp235.797 juta menjadi Rp4.831.613 juta. Di Kabupaten TTU pada tahun 2015 PDRBnya sebesar Rp2.387.078 juta pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp2.501.679 juta, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp125.222 juta menjadi Rp4.371.880 juta pada tahun 2018 mengalami peningkatan Rp132.201 juta menjadi Rp2.759.102 juta, serta pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp135.093 juta menjadi Rp2.894.195 juta. PDRB di Kabupaten Belu pada tahun 2015 sebesar Rp2.511.902 juta pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp136.909 juta menjadi Rp2.648.811 juta, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp145.146 juta menjadi Rp2.805.751 juta, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp148.702 juta menjadi Rp2.805.751 juta, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp150.932 juta menjadi Rp2.956.684 juta. PDRB Kabupaten Malaka pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1.528.580 juta, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp76.693 juta menjadi Rp1.605.274 juta, di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp82.069 juta menjadi Rp1.687.343 juta, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp86.301 juta menjadi Rp1.773.645 juta, serta di tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp86.872 juta menjadi Rp1.860.517 juta.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah perbatasan. Sektor perekonomian unggulan yang dimiliki oleh suatu wilayah akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, hal ini akan memberikan keuntungan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk

menguatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis potensi ekonomi untuk meningkatkan daya saing di kawasan perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada Kawasan perbatasan darat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu PDRB Kawasan Perbatasan Darat Provinsi NTT tahun 2019 yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis dan non-basis (keunggulan komparatif) dan analisis *Shift Share* (SS) untuk mengidentifikasi daya saing sektor ekonomi (keunggulan kompetitif). Rumus dari perhitungan LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

Keterangan:

- LQ : Nilai LQ sektor ke-i
- vi : PDRB sektor i Kabupaten
- vt : PDRB seluruh sektor (total) Kabupaten
- Vi : PDRB sektor ke i di Provinsi
- Vt : PDRB seluruh sektor (total) di Provinsi

Ada tiga kemungkinan berdasarkan hasil analisis LQ yaitu :

- 1) Jika $LQ > 1$ maka mengindikasikan sektor basis artinya komoditas tersebut telah memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri dan mampu memenuhi kebutuhan wilayah lain atau mampu diekspor
- 2) Jika nilai $LQ = 1$ maka mengindikasikan sektor tersebut seimbang dengan pangsa total atau non-ekspor yaitu hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri, belum mampu dieskspor
- 3) Jika $LQ < 1$ maka mengindikasikan sektor non-basis artinya belum memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri dan harus diimpor dari wilayah lain

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Data yang digunakan PDRB tahun 2015 dan tahun 2019. Analisis ini bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (Tarigan, 2005). Rumus perhitungan SSA adalah sebagai berikut :

$$SSA = \frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} - 1 + \frac{X_{.i(t1)}}{X_{.i(t0)}} - \frac{X_{..(t1)}}{X_{..(t0)}} + \frac{X_{ij(t1)}}{X_{ij(t0)}} - \frac{X_{.i(t1)}}{X_{.i(t0)}}$$

a

b

c

Keterangan

- a : kompenen *regional share*
- b : komponen *proportional shift*
- c : komponen *differential shift*, dan
- X.. : PDRB total Provinsi

- X.i : PDRB sektor i pada tingkat Provinsi
 Xij : PDRB sektor i pada Kabupaten ke-j
 t_1 : titik tahun akhir
 t_0 : titik tahun awal

Berdasarkan ketiga komponen pertumbuhan sektor ekonomi tersebut dapat ditentukan perkembangan sektor ekonomi pada suatu wilayah berdasarkan pergeseran bersih (*Shif Netto*). Pergeseran Bersih (SN) diperoleh dari penjumlahan antara *proportional shift* dan *diferentiation shift*. Adapun kemungkinan yang dihasilkan dari perhitungan *shift netto* adalah:

- 1) Jika $SN > 0$ maka mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor ke-i di kabupaten ke-j merupakan kelompok progresif.
- 2) Jika $SN < 0$ maka mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor ke-i di kabupaten ke-j merupakan kelompok pertumbuhan lambat.

Dari hasil analisis LQ dan SN kemudian dianalisis lebih lanjut dengan Tipologi Klassen untuk mendapatkan sektor unggul di kawasan perbatasan darat NTT. Pada Tipologi Klassen dapat diperoleh empat klaster sektor yaitu sektor unggulan, sektor potensial, sektor berkembang/andalan, dan sektor terbelakang. Klaster sektor unggulan adalah sektor-sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ dan $SN > 0$. Sektor potensial adalah sektor-sektor yang memiliki nilai $LQ < 1$ dan $SN > 0$. Sektor berkembang/andalan adalah sektor-sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ dan $SN < 0$. Sedangkan sektor terbelakang adalah sektor-sektor yang memiliki nilai $LQ < 1$ dan $SN < 0$.

Pembahasan

Analisis Location Quotien (LQ)

Pembangunan sektor-sektor ekonomi pada setiap wilayah harus disesuaikan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah sehingga diperlukan penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna baik penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Choirullah, 2007). Kinerja perekonomian Indonesia dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan dukungan peningkatan komoditas unggulan maka dapat menjadi berguna bagi pembangunan wilayah melalui analisis LQ dan SS (Oktavia et al., 2016). Apabila suatu sektor memiliki nilai LQ melebihi satu mengindikasikan bahwa peranan sektor ekonomi cukup menonjol di daerah tersebut artinya sektor tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sehingga mampu mengekspor ke wilayah lain. Sebaliknya jika sektor tersebut non-basis maka menunjukkan bahwa sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya dan harus mengimpor dari wilayah lain.

Berdasarkan hasil analisis LQ menggunakan data PDRB kawasan perbatasan Provinsi NTT (Tabel 1) menunjukkan bahwa Kabupaten Kupang memiliki 6 sektor ekonomi yang memiliki nilai $LQ > 1$ atau merupakan sektor basis yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor Industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor transportasi dan pergudangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mawikere *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa ke enam sektor tersebut merupakan sektor basis sejak tahun 2011-2015. Dapat diartikan memang sektor-sektor tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai potensi ekspor.

Tabel 1
Hasil Analisis LQ Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sektor Ekonomi	Kupang	Timor Tengah Utara	Belu	Malaka
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.482339	1.573907	0.842951	1.496582
B, Pertambangan dan Penggalian	1.724496	1.306911	2.168673	0.823878
C, Industri Pengolahan	1.491942	0.86039	0.854894	1.348615
D, Pengadaan Listrik dan Gas	0.395803	0.69359	0.848217	0.498061
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.593125	0.310475	0.333223	0.150013
F, Konstruksi	1.234739	0.928887	0.704916	1.042125
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.215740	0.405617	1.006450	0.336265
H, Transportasi dan Pergudangan	1.139171	1.119188	0.931057	1.230103
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.20164	0.859061	0.567733	0.148813
J, Informasi dan Komunikasi	0.578867	0.684019	0.540241	0.774747
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	0.185972	0.454019	1.507639	0.328780
L, Real Estat	0.645583	1.005931	1.130045	1.139758
M,N, Jasa Perusahaan	0.166032	0.367717	0.24937	0.146159
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.763544	1.182420	1.022218	1.138719
P, Jasa Pendidikan	0.389034	0.648294	1.797559	0.598802
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.381089	0.608363	1.104947	0.601492
R,S,T,U, Jasa lainnya	0.077137	0.342696	1.574889	1.295767

Sumber : Hasil Analisis

Kabupaten TTU hasil analisis LQ menunjukkan bahwa terdapat 5 sektor ekonomi yang termasuk dalam sektor basis yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor transportasi dan pergudangan, sektor real estat, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Penelitian dari Kiha dan Korbaffo (2019) juga menunjukkan hasil perhitungan LQ tahun 2015-2018 yang sama yakni kelima sektor tersebut merupakan sektor basis. Artinya sejak 5 tahun terakhir sektor-sektor tersebut memiliki tingkat spesialisasi yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan wilayahnya dan mampu mengekspor keluar wilayah. Berdasarkan penelitian dari Novista et al. (2018) menyatakan bahwa tahun 2013-2015 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga merupakan sektor basis. Namun Berdasarkan penelitian Sugihemretha (2020) pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global terutama pada sektor pariwisata, tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata sehingga berdampak pula pada sektor akomodasi makan dan minum, akibatnya sektor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk diekspor. Potensi ekspor terbesar di Kabupaten TTU ada pada sektor pertanian khususnya pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultur (Nalle dan Giri, 2020).

Hasil analisis LQ Kabupaten Belu menunjukkan bahwa terdapat 8 sektor ekonomi yang termasuk dalam sektor basis yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan besa dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estat, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Selanjutnya di Kabupaten Malaka terdapat 7 sektor ekonomi yang termasuk dalam sektor basis di berdasarkan hasil analisis LQ tahun 2019 yaitu sektor ekonomi pertanian, kehutanan dan

perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor real estat, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa lainnya. Pada penelitian Novista et al. (2018) juga menyatakan bahwa ketujuh sektor tersebut merupakan sektor basis dengan nilai $LQ > 1$ sejak tahun 2013.

Analisis Shift Share (SS)

Analisis Shift Share terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu *Regional Share*, *Proportional Shift* dan *Differential Shift*, adapun nilai perhitungan ketiga komponen tersebut terdapat pada Tabel 2. *Regional share* adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur secara agregat dengan membandingkan tahun akhir dengan tahun awal. Dari hasil analisis menunjukkan nilai *regional share* pada pertumbuhan ekonomi daerah di NTT sebesar 0,225838. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif di wilayah NTT.

Prorortional Shift menunjukkan komponen pertumbuhan ekonomi yang mengukur perubahan relatif setiap sektor. Dari hasil analisis komponen *propotional shift* menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian, industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; real estat; jasa perusahaan; serta sektor jasa pendidikan merupakan sektor-sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lambat di Provinsi NTT. Sedangkan sektor-sektor lainnya memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, khususnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor dengan pertumbuhan paling cepat di NTT. Hal ini karena sejak penetapan Pulau Komodo menjadi salah satu tujuh keajaiban warisan alam yang ada di dunia dan menjadi daya tarik bagi wisatawan baik di luar dan dalam negeri sehingga semakin meningkatkan perkembangan sektor pariwisata di NTT. Kementerian Pariwisata menyebutkan bahwa terjadi peningkatan pengunjung wisatawan setiap tahun sehingga wisata di NTT menjadi perhatian khusus bersama provinsi. Hal ini pun berdampak pada peningkatan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena adanya pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di NTT sehingga sektor ini mengalami pertumbuhan yang cepat. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi NTT Bank Indonesia (2021) menyatakan bahwa kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2020 mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2019. Pemerintah Provinsi NTT telah mengizinkan pembukaan kembali destinasi wisata sejak tahun 2020, hal ini semakin mendorong optimisme pelaku usaha pariwisata sehingga sektor pariwisata di NTT semakin meningkat dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian wilayah Provinsi NTT.

Komponen ketiga adalah *Diferential Shift* yang menentukan tingkat daya saing suatu sesuatu sektor di daerah. Dari keempat wilayah perbatasan darat di Provinsi NTT memiliki tingkat daya saing sektor ekonomi yang berbeda-beda. Kabupaten Kupang memiliki daya saing yang tinggi pada sektor pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; real estat; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah membuat program pembinaan hulu-hilir untuk pelaku usaha di bidang penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas karena memiliki keunggulan kompetitif dan punya spesialisasi, yang dapat menciptakan efek pengganda dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang. Melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non-perbankan untuk menyiapkan jasa keuangan dan asuransi

Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki daya saing yang tinggi pada sektor industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; perdagangan besar

dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta sektor jasa pendidikan. Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Nalle (2018) yang menyatakan bahwa sektor sektor tersebut termasuk dalam sektor yang berpotensi.

Kabupaten Belu memiliki sektor dengan daya saing yang tinggi hampir pada semua sektor khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Belu dalam dokumen RTRW Provinsi NTT di tetapkan sebagai Wilayah Pengembangan I pada Pulau Timor dengan Atambua sebagai pusat wilayah pengembangannya sehingga terjadi konsentrasi pembangunan wilayah pada Kabupaten Belu. Kabupaten Belu sebagai salah satu daerah yang berada pada garis terdepan dan meskipun tergolong sebagai daerah terbelakang namun dalam kurung waktu terbilang singkat, sektor pembangunan khususnya sektor infrastruktur mengalami perkembangan pesat (Oki dan Pangastuti 2020).

Tabel 2
Hasil Analisis Shift Share Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sektor Ekonomi	Differential Shift				Proportional Shift	Regional Share
	Kupang	TTU	Belu	Malaka		
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.01474	-0.00593	0.01986	0.00704	-0.07095	0.22584
B, Pertambangan dan Pengalihan	0.18211	-0.00106	-0.16295	0.10173	-0.08490	0.22584
C, Industri Pengolahan	-0.05838	0.01335	-0.03034	-0.02336	0.03267	0.22584
D, Pengadaan Listrik dan Gas	0.03042	-0.03247	0.00477	0.00928	0.04882	0.22584
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.06289	0.01713	0.09054	0.07291	-0.12240	0.22584
F, Konstruksi	0.03593	-0.08454	0.00810	-0.04844	0.06586	0.22584
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.02291	0.05675	-0.03843	-0.03871	0.07273	0.22584
H, Transportasi dan Pergudangan	-0.01783	-0.03229	-0.04435	-0.07158	0.07274	0.22584
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.27368	-0.31281	-0.06851	-0.20805	0.32606	0.22584
J, Informasi dan Komunikasi	-0.03273	-0.07384	-0.07843	-0.07237	0.03172	0.22584
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	-0.01453	-0.01439	-0.02001	-0.02069	0.00858	0.22584
L, Real Estat	0.05761	-0.00886	0.02915	0.05863	-0.08317	0.22584
M,N, Jasa Perusahaan	0.15279	0.07311	0.03698	-0.00344	-0.07391	0.22584
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.08556	0.08235	0.07027	0.01845	0.06820	0.22584
P, Jasa Pendidikan	-0.03439	0.05165	0.08160	0.06021	-0.01271	0.22584
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.04501	-0.10776	0.09180	0.10467	0.05386	0.22584
R,S,T,U, Jasa lainnya	0.04077	-0.19010	0.05795	0.04280	0.00794	0.22584

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Sedangkan untuk Kabupaten Malaka memiliki sektor dengan daya saing yang tinggi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya. Hal ini karena Kabupaten Malaka direncanakan Kabupaten Malaka pula termasuk dalam salah satu kabupaten di wilayah perbatasan yang untuk pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor sebagai kabupaten sentra komoditas jagung sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 215/Kpts/OT.050/3/2017 sehingga diharapkan dapat mengeksport hasil pertanian ke negara tetangga

Namun, keempat kabupaten di perbatasan darat NTT tidak ada satupun yang memiliki daya saing tinggi pada sektor transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi. Hal ini dikarenakan beberapa komponen sektor tersebut mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi covid 19. Pemerintah Provinsi NTT mengeluarkan kebijakan *physical distancing* sehingga sebagai sektor perekonomian mengalami kontraksi (Laporan Perekonomian Provinsi NTT, Bank Indonesia 2020) dan berdasarkan analisis hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020 yang paling besar mengalami penurunan pendapatan adalah Usaha Mikro Kecil dengan presentase sebesar 73,73%. Sektor usaha yang sangat mengalami tingkat penurunan pendapatan terbesar adalah sektor akomodasi dan makanan dan minuman yakni sebesar 90,00 %. Penurunan permintaan dari konsumen akibat Covid-19 didominasi oleh perusahaan pada sektor penyediaan akomodasi dan manakan minuman dengan presentase 88,67%.

Analisis Tipologi Klassen

Tabel 3
Hasil Tipologi Klassen Kabupaten Kupang

	SN>0	SN<0
LQ>1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan penggalian, 2. Konstruksi, 3. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan Sepeda motor 4. Transportasi dan pergudangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Industri Pengolahan
LQ<1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas, 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 3. Jasa Perusahaan, 4. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 5. Jasa lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang, 2. Informasi dan Komunikasi, 3. Jasa Keuangan dan Asuransi, 4. Real Estate, 5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 6. Jasa Pendidikan

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Sektor Unggulan di Kabupaten Kupang

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sektor unggulan di Kabupaten Kupang adalah pertambangan dan penggalian, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan. Wilayah Kabupaten Kupang mempunyai potensi bahan galian golongan C yang cukup besar, selain bahan galian golongan C juga terdapat bahan galian golongan B (BPS kabupaten Kupang, 2019). Keberagaman kondisi pangan dan potensi keadaan alam yang kaya perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui strategi pengembangan program-program pemerintah, dimana pemerintah daerah Kabupaten Kupang memiliki program khusus dalam meningkatkan sektor Pertanian guna peningkatan ekonomi Masyarakat yaitu tertuang dalam visi dan misi serta program 5P yang pertama yaitu bidang pertanian.

Tabel 4
Hasil Tipologi Klassen Kabupaten TTU

	SN>0	SN<0
LQ>1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi dan Pergudangan 2. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pertanian, Kehutanan dan perikanan 4. Pertambangan dan Penggalian 5. Real Estate
LQ<1	<ol style="list-style-type: none"> 6. Industri Pengolah 7. Pengadaan Listrik dan Gas 8. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Jasa Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Pengadaan air, pengolahan sampah, Limbah dan daur ulang 12. Konstruksi 13. Informasi dan Komunikasi 14. Jasa Keuangan dan Asuransi 15. Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial 16. Jasa lainnya

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Sektor Unggulan di Kabupaten TTU

Hasil tipologi klassen Kabupaten TTU pada Tabel 4 menunjukkan bahwa yang termasuk dalam sektor unggulan adalah transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Hal ini karena didukungnya keberadaan dua pintu perbatasan negara di wilayah perbatasan Kabupaten TTU yaitu di Wini dan Napan sehingga mobilitasnya meningkat. Meskipun sektor pertanian tidak termasuk dalam sektor unggulan namun tergolong dalam kategori potensial sehingga dalam dokumen RPJMD Kabupaten TTU tahun 2016-2021 sektor pertanian mendapat perhatian lebih dengan dijadikan sebagai urutan pertama dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan di kabupaten selanjutnya pengembangan dalam sektor pertambangan dan penggalian pun menjadi prioritas sehingga sudah sesuai dengan potensi unggulan wilayahnya.

Tabel 4
Hasil Tipologi Klassen Kabupaten Belu

	SN>0	SN<0
LQ>1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor 2. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 3. Jasa pendidikan 4. Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial 5. Jasa lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pertambangan dan penggalian 7. Jasa keuangan dan asuransi 8. Real estat
LQ<1	<ol style="list-style-type: none"> 9. Industri pengolahan 10. Pengadaan listrik dan gas 11. Konstruksi 12. Transportasi dan pergudangan 13. Penyediaan akomodasi dan makan minum 	<ol style="list-style-type: none"> 14. Pertanian, kehutanan dan perikanan 15. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 16. Informasi dan komunikasi 17. Jasa perusahaan

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Sektor Unggulan di Kabupaten Belu

Hasil klasifikasi analisis Tipologi Klassen Kabupaten Belu pada Tabel 6 menunjukkan bahwa yang termasuk dalam sektor unggulan adalah perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, Jasa Pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya. Hal ini karena Kabupaten Belu dalam dokumen RT/RW Provinsi NTT tahun 2010-2030 ditetapkan sebagai wilayah pengembangan II atau Hirarki II yang wilayah pelayanannya yaitu Kabupaten TTU dan Kabupaten Malaka sehingga karena jangkauan wilayahnya lebih luas, hal ini berdampak pada meningkatnya sarana pelayanan umum diantaranya pendidikan, ekonomi dan kesehatan serta jasa lainnya.

Tabel 5
Hasil Tipologi Klassen Kabupaten Malaka

	SN>0	SN<0
LQ>1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iindustri pengolahan 2. Konstruksi 3. Transportasi dan pergudangan 4. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 5. Jasa lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pertanian, kehutanan dan perikanan 7. Real estat
LQ<1	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pertambangan dan penggalian 9. Pengadaan listrik dan gas 10. Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor 11. Penyediaan akomodasi dan makan minum 12. Jasa pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 14. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang 15. Informasi dan komunikasi 16. Jasa keuangan dan asuransi 17. Jasa perusahaan

13. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Sektor Unggulan di Kabupaten Malaka

Hasil analisis Tipologi Klassen pada Tabel 5 menunjukkan bahwa yang termasuk sektor unggulan di Kabupaten Malaka adalah sektor Industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Di Kabupaten Malaka terdapat industri pengolahan besar yaitu industri garam dengan luas lahan sebesar 300 Ha. Berdasarkan artikel di redaksi Bisnis.com (2019) menyatakan bahwa Kabupaten Malaka memiliki potensi produksi garam 700.00 ton pertahun dan berdasarkan artikel di redaksi pos Kupang (2021) menyatakan bahwa kualitas produksi industri garam di Kabupaten Malaka memiliki kualitas nasional dan diharapkan dapat menekan impor industri garam yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Di Kabupaten Malaka karena merupakan wilayah pemekaran baru sehingga pembangunannya masif, hal ini memberikan kontribusi pada nilai sektor konstruksi yang tinggi. Dalam RPJMD Kabupaten Malaka menunjukkan bahwa prioritas program pembangunan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian melalui kebijakan Revolusi Pertanian Malaka yaitu memberikan bantuan pengolahan tanah gratis, pendampingan oleh ahli dalam pengolahan produk pertanian dan lain sebagainya sehingga semakin meningkatkan produksi dan produktivitas produk pertanian unggulan di Kabupaten Malaka. Meskipun sektor pertanian tidak termasuk dalam sektor unggulan berdasarkan hasil klasifikasi tipologi klassen namun sektor pertanian di Kabupaten Malaka termasuk dalam klasifikasi sektor potensial sehingga rencana pembangunan wilayahnya tetap memprioritaskan sektor pertanian.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah perbatasan darat Nusa Tenggara Timur memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Kabupaten Kupang memiliki potensi unggulan pada sektor pertambangan dan penggalian; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; dan sektor transportasi dan pergudangan. Kabupaten Timur Tengah Utara memiliki potensi unggulan pada sektor transportasi dan pergudangan serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kabupaten Belu unggul pada sektor perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya. Sedangkan Kabupaten Malaka memiliki sektor unggulan yaitu industri pengolahan; konstruksi; transportasi dan pergudangan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta sektor jasa lainnya.

Melalui identifikasi sektor unggulan, perencanaan kegiatan ekonomi diprioritaskan pada sektor yang menjadi spesialisasi daerah dan berimplikasi lebih luas bagi perekonomian daerah. Diperlukan penguatan hubungan antar wilayah, khususnya memperkuat hubungan *forward* dan *backward* sektor-sektor ekonomi. Sehingga hal ini mampu meminimalisis persaingan antar wilayah perbatasan dan mengurangi disparitas.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2019. Profil Kabupaten Kupang. Kupang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2005. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara. Jakarta : Bappenas
- Bank Indonesia. 2021. Laporan Perekonomian Provinsi NTT. Jakarta : BI
- Indonesia, R. (2007). *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara*.
- Indonesia, R. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)*.
- Jhingan ML. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta (ID): Raja Grafindo persada
- Kemitraan Partenertship. 2011. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. The Partnership for Governance Reform*. Jakarta
- Kennedy PSJ, Tobing SJ, Heatubun AB, Toruan RL. 2018. Strategic Issues of Indonesian Border Area Development Based on The Master Plan 2015- 2019. *Proceeding International Seminar on Accounting for Society*: 190- 198
- Keputusan Menteri Pertanian. No.215/Kpts/OT.050/3/ 2017 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan dalam rangka Membangun Lumbung Pangan melalui pendekatan kawasan terpadu. Jakarta (ID): Sekretaris Negara.
- Kiha EK. Korbafo YA. 2019. Analisis Sektor Unggulan dan strategi pengembangannya dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal AKRAB JUARA* Volume 4 Nomor 4 Edisi November 2019 (43-57)
- Kusumastuti, RB. Purnamadewi, Yeti Lis. 2014. *Strategi Pembangunan Ekonomi Wilayah Provinsi Kalimantan Utara*. Bogor : Repository Institut Pertanian Bogor
- Maliatja FM. Sambiran, Sarah. Mantiri, MMS. 2019. Implementasi Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pembangunan Infrastruktur. *Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi*
- Mawikere HA. Witjaksono A. Widodo WHS. 2017. Strategi pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Malang : Institut Teknologi Nasional
- Nalle FW. Giri AM. 2020. Analisis Potensi Sektor Unggulan di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Issn: 2503-3093 (Online) Vol 5 No.2 Juni 2020
- Nalle, Frederric W. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. *Undip: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*
- Novista T. Purnamadewi YL. 2019. Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Oki, Kamilaus Konstanse. Pangastuti, Margaretha Diana. 2020. Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Maurisu Selatan Kecamatan Bikomi Selatan. *Ekopem : Jurnal Ekonomi Pembangunan*

- Oktavia, H. F., Hanani, N., & Suhartini. (2016). Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Pendekatan Input-output). *Jurnal Habitat*, 27 (2), 72–84.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. 2016-2021. Kefamenanu: Bappeda TTU
- Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2014. Kupang: Bappeda NTT
- Sugiyanto, Sukesi. 2010. Penelitian Pengembangan Pusat pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamandau. *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 1(2):202-215
- Tarigan R. 2005. *Ekonomi Regional-Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta (ID): Bumi Aksara